

SKRIPSI
SISTEM PERWAKILAN INDONESIA PASCAAMANDEMEN
UNDANG-UNDANG DASAR 1945



**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Akhir Guna Memenuhi Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum**

OLEH:
NAMA : NITA RACHEL CHRISTIANI NOVELINA
NPM : 2004115058

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA

2008

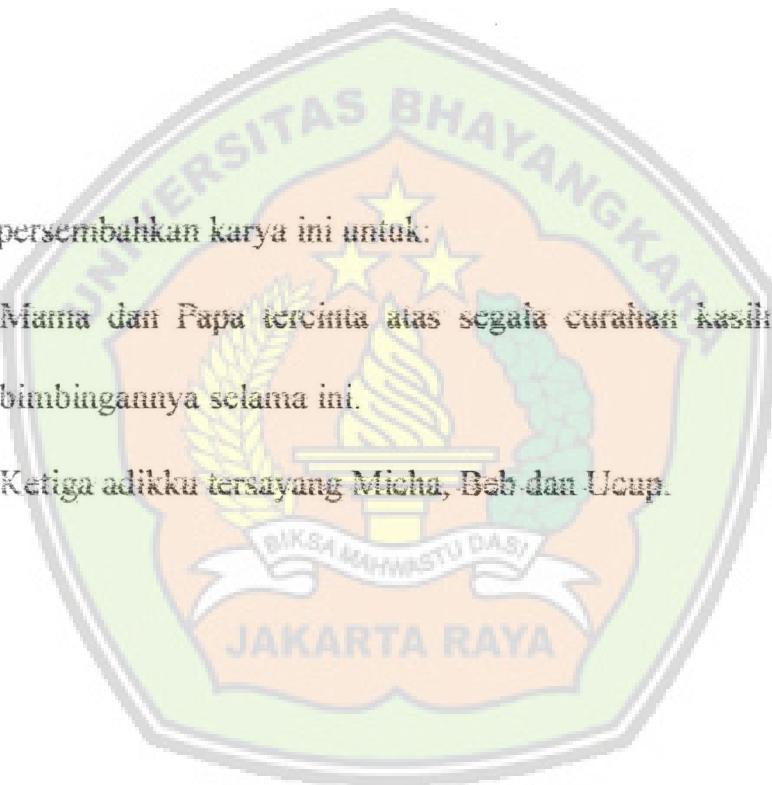
MOTTO/PERSEMBAHAN

"RANCANGAN TUHAN ADALAH HIDUPKU"

(SANGKAP NI JAHOWA DO NGOLUNGKU)

Kupersembahkan karya ini untuk:

- Mama dan Papa tercinta atas segala curahan kasih sayang dan bimbingannya selama ini.
- Ketiga adikku tersayang Micha, Beb dan Ucup.



PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : NITA RACHEL CHRISTIANI N.

NPM : 2004115058

FAK/PROG STUDI : HUKUM/ILMU HUKUM

JUDUL PROPOSAL SKRIPSI : SISTEM PERWAKILAN

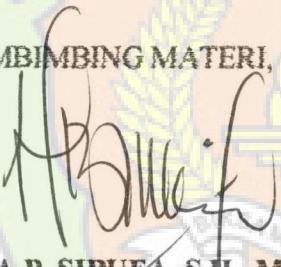
PASCAAMANDEMEN UNDANG-

UNDANG DASAR 1945

DISETUJU OLEH:

PEMBIMBING MATERI,

PEMBIMBING TEKNIK,

 HOTMA P. SIBUEA, S.H., M.H.

 HERYBERTUS S., S.H., M.H.

JAKARTA RAYA

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
PROGRAM STRATA SATU FAKULTAS HUKUM
SK TERAKREDITASI NOMOR: 001/BAN-PT/Ak-XI/S1/IV/2008

PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : NITA RACHEL CHRISTIANI NOVELINA
NPM : 2004115058
FAK/PROG.STUDI : HUKUM/ILMU HUKUM

JUDUL SKRIPSI
**SISTEM PERWAKILAN PASCAAMANDEMEN
UNDANG-UNDANG DASAR 1945**

Skripsi Ini Telah Dipertahankan Di Depan Para Penguji Pada Tanggal 22 September 2008 dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima

SUSUNAN DEWAN PENGUJI
KETUA PENGUJI
HOTMA P. SIBUEA, S.H., M.H.

PENGUJI I,

Dr. Drs. A.A. OKA DHERMAWAN, S.H, M.Hum., M.Si.

PENGUJI II,

SINGGIH RAHADI, S.H., M.M.

MENGETAHUI :

DEKAN FAKULTAS HUKUM,

Dr. Drs. A.A. OKA DHERMAWAN, S.H, M.Hum., M.Si

ABSTRAK

Nita Rachel Christiani Novellina, 2004115058, Sistem Perwakilan Pascaamandemen Undang-Undang Dasar 1945, Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, 2008.

Sistem perwakilan pada esensinya berkaitan dengan struktur organisasi badan perwakilan rakyat. Dalam teori sistem perwakilan, dikenal ada dua macam sistem perwakilan yaitu sistem perwakilan satu kamar atau sistem unikameral dan sistem perwakilan dua kamar atau sistem bikameral. Setelah perubahan Undang-Undang Dasar 1945, sistem perwakilan di Indonesia memiliki lembaga perwakilan yang terdiri atas DPR yang merupakan representasi kepentingan politik dan DPD yang merupakan representasi kepentingan daerah. Kedua lembaga negara tersebut dalam pengisian keanggotannya dipilih oleh rakyat melalui pemilihan umum. Selain itu, ada juga MPR yang mempunyai lingkungan jabatan dan wewenang tersendiri. Keanggotannya terdiri atas anggota DPR dan anggota DPD. Jadi, dalam sistem perwakilan Indonesia terdapat badan perwakilan rakyat yang terdiri atas MPR, DPR dan DPD.

Sesuai dengan uraian yang dikemukakan di atas ada beberapa masalah yang dapat dikemukakan sebagai masalah penelitian ini. Pertama, apakah sistem perwakilan Indonesia pascaamandemen UUD 1945 dapat mendukung sistem pemerintahan berdasarkan UUD 1945? Kedua, bagaimanakah sistem perwakilan Indonesia yang dapat mendukung sistem pemerintahan menurut UUD 1945?

Sesuai dengan kedua permasalahan yang dikemukakan di atas, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut. Pertama, untuk meneliti sistem perwakilan Indonesia pascaamandemen UUD 1945 dapat mendukung atau tidak sistem pemerintahan yang diatur berdasarkan UUD 1945. Kedua, untuk meneliti sistem perwakilan Indonesia yang dapat mendukung sistem pemerintahan yang diatur berdasarkan UUD 1945.

Metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah meneliti bahan-bahan yang didokumentasikan dalam buku-buku, karya ilmiah, jurnal-jurnal dan lain-lain. Yang didapat dari perpustakaan atau tempat-tempat lain yang berfungsi untuk menyimpan data *kepustakaan*. Bahan-bahan buku yang didapatkan dari studi kepustakaan (*library research*) tersebut dipilah-pilah, sehingga didapatkan bahan-bahan hukum yang relevan dengan permasalahan hukum yang ada. Kemudian ditafsirkan untuk mencari makna dari kaidah-kaidah hukum, teori-teori hukum dan asas-asas hukum yang sesuai. Agar dapat diterapkan dalam penyelesaian masalah hukum (*problem solving*).

Penelitian ini menunjukkan hasil-hasil sebagai berikut. Pertama, sistem perwakilan Indonesia pascaamandemen UUD 1945 tidak dapat mendukung sistem pemerintahan Indonesia berdasarkan UUD 1945. Sebab, ada sentralisasi kewenangan di tangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Hal ini tidak memungkinkan terjadinya prinsip “checks and balances” (sistem pengawasan dan perimbangan) antarlembaga negara yang dicita-citakan dalam sistem pemerintahan Indonesia yaitu sistem presidensial. Kedua, sistem perwakilan Indonesia yang dapat mendukung sistem pemerintahan berdasarkan UUD 1945 adalah sistem perwakilan bikameral yang bersifat *strong bicameral* (sistem perwakilan dengan dua kamar yang sama-sama kuat). Dengan adanya dua kamar dalam sistem perwakilan, mekanisme *checks and balances* dalam sistem pemerintahan yang diatur UUD 1945 dapat dilaksanakan.

Sesuai dengan hasil yang dikemukakan di atas dapat diuraikan beberapa saran sebagai berikut. Pertama, Undang-Undang Dasar 1945 perlu dilakukan amandemen. Kedua, dalam rangka amandemen tersebut redaksi Pasal 2 ayat (1) UUD 1945 perlu diubah menjadi “Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah yang kewenangannya diatur dalam konstitusi

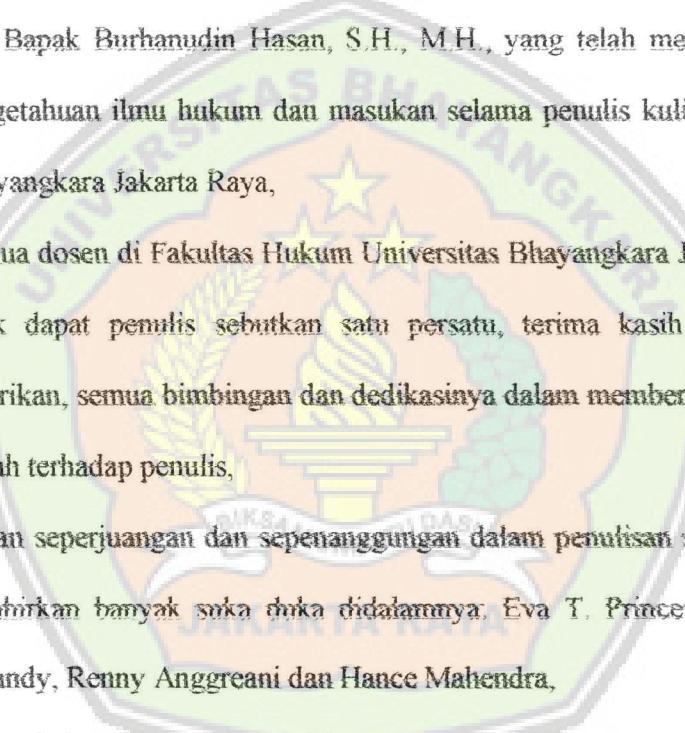
KATA PENGANTAR

Salam Sejahtera

Puji dan syukur kepada Engkau Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena anugerah dan berkatMu, serta turut campur tanganMu yang memberi kesehatan kepada penulis sehingga penulis semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.

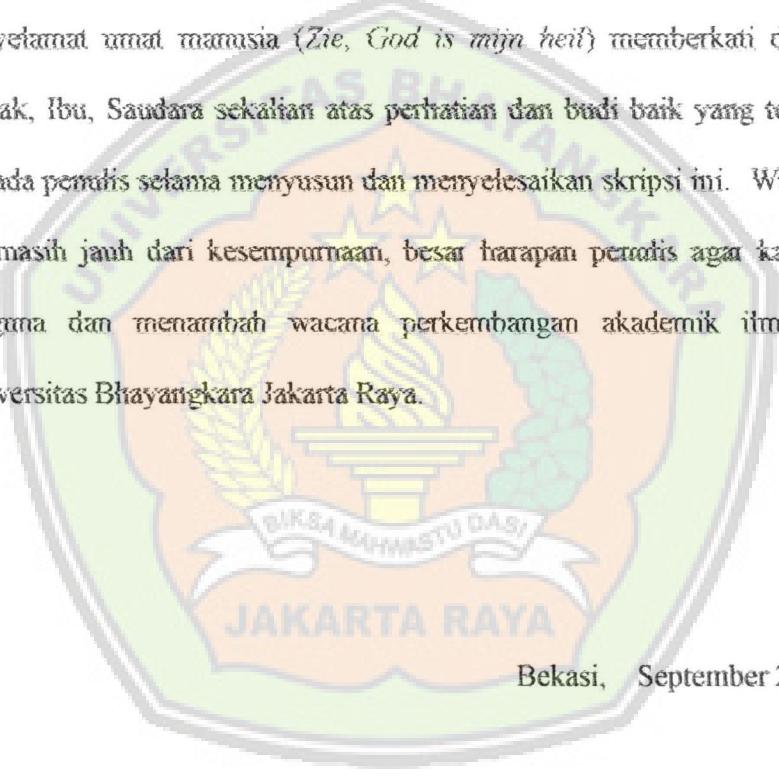
Penulis mendapatkan banyak dorongan, bimbingan serta bantuan dari berbagai pihak untuk mengurangi hambatan-hambatan yang penulis hadapi. Oleh karena itu, penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada pihak-pihak yang membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini antara lain:

1. Bapak Drs. Logan Siagian, S.H., M.H., selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya,
2. Bapak Dr. Drs. A.A. Oka Dhermawan, S.H, M.Hum., M.Si., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya,
3. Bapak Hotma P. Sibuea, S.H., M.H., Dosen Pembimbing Materi penulis yang telah banyak memberikan inspirasi dan bimbingan kepada penulis dalam mengarahkan penulisan skripsi ini. Banyak perkembangan ilmu pengetahuan terutama di bidang ilmu hukum yang diberikan secara langsung dan tidak langsung oleh beliau. Tak lupa atas motivasi dan dukungan beliau serta waktu yang diberikan dengan kesabaran mempermudah penulis sampai selesaiya penulisan skripsi ini,

- 
4. Bapak Herybertus Soekartono, S.H., M.H., Dosen Pembimbing Teknik yang telah memberikan bimbingan dan masukan terhadap penulis dan waktu yang diluangkan untuk membantu penulis dalam penulisan skripsi ini,
 5. Ibu Siti Ropiah, S.H., M.H., Kabid II Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya dan Bapak Adi yang membantu penulis dalam hal perkuliahan,
 6. Bapak Singgih Rahadi, S.H., M.M, Bapak J. Karsa Simamora, S.H., M.M., dan Bapak Burhanudin Hasan, S.H., M.H., yang telah memberikan penulis pengetahuan ilmu hukum dan masukan selama penulis kuliah di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya,
 7. Semua dosen di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas ilmu yang diberikan, semua bimbingan dan dedikasinya dalam memberikan bahan-bahan kuliah terhadap penulis,
 8. Rekan seperjuangan dan sepenanggungan dalam penulisan skripsi yang telah melahirkan banyak soka duka didalamnya; Eva T. Princes Sitompul, Dadi Arhandy, Renny Anggreani dan Hance Mahendra,
 9. Para sahabat yang selama ini banyak memberikan semangat, saling berbagi keluhan satu sama lain yaitu Jaingin T., Devi Aprianti, Ahmad Fauzan A., Yulia Pusa, Yulyanthi Kurniawati, Ria Amelia,
 10. Semua Teman FH Angkatan 2004 yang tidak bisa disebutkan satu persatu, terima kasih atas persahabatan yang sudah terjalin hampir empat (4) tahun ini,

11. Orang tua tercinta dan adik-adik tersayang: Harry Michael Frans Diano Simamora, Febryanti Elyzabeth Flower Simamora dan Yusup Moya Yanuar Simson Simamora yang senantiasa memberikan dorongan dan semangat hingga terselesainya skripsi ini,
12. Pihak-pihak lain yang telah banyak membantu dalam proses penulisan skripsi ini.

Kiranya Tuhan Yang Maha Esa yang merupakan sumber berkat dan peryelamat umat manusia (*Zie, God is mijn heil*) memberkati dan menolong Bapak, Ibu, Saudara sekalian atas perhatian dan budi baik yang telah diberikan kepada penulis selama menyusun dan menyelesaikan skripsi ini. Walaupun karya ini masih jauh dari kesempurnaan, besar harapan penulis agar karya ini dapat berguna dan menambah wacana perkembangan akademik ilmu hukum di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.



Bekasi, September 2008

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
MOTTO/PERSEMBAHAN	ii
LEMBAR PERSETUJUAN	iii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iv
ABSTRAKSI.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Kerangka Teoritis	13
1. Demokrasi	13
2. Sistem Perwakilan	19
a. Sistem Satu Kamar (Unikameral).....	20
b. Sistem Dua Kamar (Bikameral)	21
3. Fungsi Lembaga Perwakilan	22
B. Kerangka Pemikiran	24

B.	Pendekatan	28
C.	Bahan Hukum	29
D.	Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	32
E.	Teknik Pengolahan Bahan Hukum	32
F.	Analisis Bahan Hukum	34
BAB IV SISTEM PERWAKILAN INDONESIA YANG MENDUKUNG SISTEM PEMERINTAHAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945		
A.	Apakah Sistem Perwakilan Indonesia Pascaamandemen Undang-Undang Dasar 1945 Dapat Mendukung Sistem Pemerintahan Menurut Undang-Undang Dasar 1945?	36
B.	Bagaimana Sistem Perwakilan Indonesia Yang Dapat Mendukung Sistem Pemerintahan Undang-Undang Dasar 1945?	55
BAB V PENUTUP		
A.	Kesimpulan	74
B.	Saran.....	74

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN